

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten

Deris Desmawan¹, Risa Novianti Ramdani², Yuan Amelia Muralifta³,
Syahtriandi Wirantara⁴, Noviarti Elsa Handayani⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3,4,5}

Email: deridesmawan@untirta.ac.id¹, 5553230007@untirta.ac.id²,
5553230015@untirta.ac.id³, 5553230018@untirta.ac.id⁴, 5553230028@untirta.ac.id⁵

Corresponding Author: 5553230018@untirta.ac.id

Abstract

Poverty is a real problem in many regions, including in Banten. Poverty has a very broad impact, including its negative impact on economic growth. This study aims to identify the effect of poverty on economic growth by using secondary data from various sources such as BPS, and Related Literature. The result is that there is a negative relationship between the level of poverty and economic growth. Poverty can hinder economic growth through a variety of channels, including reduced labor productivity, decreased purchasing power, and lack of access to education. Therefore, efforts to reduce poverty are expected to support sustainable economic growth. This study is intended to contribute to broaden horizons related to the relationship between poverty and economic growth and provide relevant policy implications to address the problem of poverty and increase economic growth in Indonesia, especially in Banten province.

Keywords: Effect Of Poverty, Economic Growth, Banten.

I. Pendahuluan

Fenomena pertumbuhan ekonomi ialah perubahan dalam aktivitas ekonomi suatu wilayah yang tercermin dari peningkatan *output* produk yang diproduksi pada masa tertentu. Hal ini dapat meliputi peningkatan pendapatan per kapita, ekspansi sektor-sektor ekonomi tertentu, dan perkembangan infrastruktur. Fenomena ini sering kali menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Penambahan pendapatan setiap tahun

diperlukan karena jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi sehari-hari meningkat setiap tahunnya, yang merupakan kondisi utama yang harus dipenuhi untuk keberlanjutan dibangunnya ekonomi dan naikan level kemakmuran. (Tambunan, 2009). Di sector penawaran, tumbuhnya populasi memerlukan pertumbuhan lapangan kerja untuk menambah sumber pendapatan. Tanpa pertumbuhan kesempatan kerja yang seiring, pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan disparitas dalam distribusi tambahan pendapatan (*ceteris paribus*), yang kemudian akan

menghasilkan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi berdampak dengan menaikkan tingkat kemiskinan. (Tulus T.H. Tambunan, 2009).

Tingkat pengangguran menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kemajuan ekonomi suatu negara karena mencerminkan seberapa efektif pasar pekerja guna mengambil angkatan kerja yang ada. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin kuat perekonomian suatu negara dan semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penurunan tingkat pengangguran biasanya dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan investasi. Namun, tingkat pengangguran yang besar bisa menimbulkan efek buruk seperti kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai seringkali menjadi akar penyebab timbulnya pengangguran, terutama saat pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan laju penciptaan lapangan kerja yang memadai. Selain itu, tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah juga berkontribusi pada masalah ini. Ini muncul sebab kurangnya pertumbuhan dalam perluasan lapangan pekerjaan.

Diharapkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran, yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan tingkat upah. Kenaikan tingkat upah juga diharapkan dapat menyebabkan turunnya kuantitas pengangguran. Namun, adanya tingkat inflasi yang tinggi diperkirakan akan menyebabkan peningkatan

kuantitasnya. (Sukirno, 2008). Kemiskinan adalah masalah sosial yang cukup rumit yang memberi pengaruh atas pola hidup banyak orang di dunia. Dampaknya mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang terjangkau, serta peluang pekerjaan yang layak. Kemiskinan juga seringkali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hal ini bisa memberi hambatan atas penyusunan lingkup ekonomi di sebuah wilayah, serta memperkuat siklus kemiskinan dari generasi ke generasi. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang holistik melalui kebijakan publik, investasi dalam infrastruktur sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Dalam kajian ini, penulis mencoba menganalisa pengaruh kemiskinan atas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

II. Landasan Teori Konsep Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) kemiskinan adalah ketidakcakapan personal atau golongan guna mencukupi keperluan pokok seperti makan, pendidikan, rumah dan kesehatan, serta mencakup kurangnya akses terhadap peluang ekonomi dan sosial yang merata dalam masyarakat. Hal ini sering kali disertai dengan keterbatasan dalam akses terhadap peluang pendapatan yang layak, menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diatasi. Kemiskinan bisa juga menjadikan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat serta menghambat pembangunan

berkelanjutan secara keseluruhan. (Ni Putu & I made, 2014).

Dalam pendapat Peter Townsend dari Robert Gordon University, kemiskinan merujuk pada kekurangan atau ketidakcukupan akses terhadap pangan, fasilitas, layanan dasar, dan aktivitas yang diperlukan oleh suatu masyarakat. (Fuad et al., 2020).

Konsep pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomiyakni peningkatan kuantitatif dari output ekonomi suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ini melibatkan peningkatan dalam produksi barang dan jasa, serta peningkatan dalam pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan indikator seperti PDB atau PNB. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil dianggap penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan sosial dan infrastruktur.

Konsep Pengangguran

Menurut BPS, pengangguran didefinisikan sebagai individu yang tak sedang bekerja namun sedang aktif cari kerja atau sedang menyiapkan diri untuk memulai usaha baru, atau individu yang telah diterima bekerja tetapi belum memulai pekerjaan. Sukirno (1994) mendefinisikan pengangguran yakni kondisi di mana personal mencukupi syarat bekerja tak bisamenemuinya sebab tak selaras ataskecakapannya, meski ia aktif mencari pekerjaan. Hal ini

mencerminkan ketidakcocokan antara *supply and demand* tenaga kerja dalam pasar kerja, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. (Menteri Pendidikan, 2007).

III. Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data pada kajian ini, peneliti memakai sumber data kualitatif, Data kualitatif adalah jenis data yang disatukan dalam bentuk deskripsi naratif atau kata-kata, yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu. Tujuannya guna memberikan pemahaman atas objek yang dikaji, serta untuk mengeksplorasi aspek-aspek subjektif dari fenomena yang diteliti.
2. Sumber data
Data sekunder ialah informasi yang sudah dijalankan atau sudah ada dan berkaitan dengan objek kajian, yang berasal dari sumber seperti dokumen organisasi atau institusi lainnya. Data ini dapat berupa hasil penelitian sebelumnya atau catatan yang relevan dengan topik yang dibahas.

Metode Pengumpulan Data

Satori dan Komariah (2011: 103) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam konteks penelitian ilmiah ialah tahapan tersusun rapiguna menyatukan data yang diperlukan. Maka, penerapan teknik pengumpulan data untuk memastikan

konsistensi dan relevansi antara data yang diharapkan dengan situasi di lapangan harus dilakukan. Pada kajian ini, datanya memakai data sekunder. (Iii et al., 2012). Menurut Sugiyono (2016: 225) memaknainya dengan jenis sumber data yang tidak secara langsung diperoleh oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti individu lain atau dokumen. Pada kajian ini, teknik pengumpulannya memakai studi dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen. (Iii & Penelitian, 2016).

Data sekunder mencakup beragam jenis informasi, termasuk data survei, statistik, historis, ekonomi, dan sebagainya. Pada kajian ini, penggunaan data sekunder melibatkan pengumpulan data dari BPS melalui website resminya dan analisis selaras dengan misi kajian.

Metode Analisis

Metode Kualitatif

Pada kajian ini, dipakailah metode kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada pendalaman peristiwa, dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman konteks. Metode ini melibatkan pengumpulan data berupa teks, gambar, atau suara, dan menganalisisnya secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang mungkin ada antara variabel yang diteliti.

IV. Hasil Dan Pembahasan Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan secara keseluruhan

dalam produksi barang dan jasa dalam suatu area tertentu selama dalam masa yang ditentukan juga. Hal ini sering kali diukur dengan tingkat pertumbuhan PDB. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk tingkat kesempatan kerja, pendapatan per kapita, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Tabel 1. Laju pertumbuhan PDRB
ADHK Provinsi Banten Tahun 2017-
2022**

No	Tahun	Laju pertumbuhan PDRB ADHK
1	2017	5,96
2	2018	5,88
3	2019	5,40
4	2020	-2,48
5	2021	4,12
6	2022	4,87

Sumber :

<https://banten.bps.go.id/indicator/52/313/1/laju-pertumbuhan-pdrb-adhk-menurut-kab-kota-di-provinsi-banten.html>

Dari tabel tersebut, terlihat bahwasanya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Banten terkena fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2022. Kota Tangerang Selatan memiliki laju pertumbuhan PDRB ADHK tertinggi, sementara Kota Tangerang memiliki laju pertumbuhan PDRB ADHK terendah.

Deskripsi Pengangguran Provinsi Banten

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	2017	9,38
2	2018	8,42
3	2019	8,22
4	2020	10,39
5	2021	9,05
6	2022	8,29

Sumber :

<https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>

Mengacu tabel tersebut, terlihat bahwa TPT di Prov Banten menurut Kabupaten/Kota mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2022. Kabupaten Serang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 11,60%, sedangkan Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah sebesar 6,66%.

Deskripsi Kemiskinan Provinsi Banten

Di bawah ini adalah persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan Provinsi Banten pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Garis Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
1	2017	364.268
2	2018	438.532
3	2019	467.147
4	2020	508.983

5	2021	493.539
6	2022	525.031

Sumber :

<https://banten.bps.go.id/indicator/23/48/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>

Dari data tabel di atas, terlihat bahwa garis kemiskinan di Provinsi Banten mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2022. Kota Tangerang Selatan memiliki pendapatan tertinggi per bulan sebesar Rp609.854, sementara Kabupaten Serang memiliki pendapatan terendah per bulan sebesar Rp327.093. Ini berarti bahwa pengeluaran atau pendapatan mereka lebih dari Rp243.547 per bulan atau Rp8.118 per hari. Menurut data Susenas BPS pada Maret 2022, garis kemiskinan penduduk Indonesia ditetapkan sebesar Rp 505.469 per kapita per bulan. Maknanya, individu dengan pendapatan atau pengeluaran per kapita per bulan di atas angka tersebut dianggap bukan penduduk miskin. Dengan demikian, dari data tersebut terpampang bahwasanya mayoritas Kab/Kota di Provinsi Banten memiliki kebanyakan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2017	5,52
2	2018	5,31
3	2019	5,25
4	2020	6,03
5	2021	6,59
6	2022	6,01

Sumber :

<https://banten.bps.go.id/indicator/23/78/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten-.html>

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwasanya persentase penduduk miskin di Provinsi Banten dicemrinkan dari Kab/Kota mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2022. Persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kabupaten Pandeglang, mencapai 9,78%, sedangkan persentase terendah terjadi di Kota Tangerang Selatan, dengan angka 2,08%.

Analisis Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten

Pengangguran adalah masalah yang rumit dan sangat signifikan, sebab terkait dengan berbagai indikator ekonomi. Indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi suatu negara, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan standar upah yang berlaku. Seluruh elemen tersebut memberi pengaruh atas tingkat pengangguran dalam suatu wilayah. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, diharapkan akan mengakibatkan penurunan jumlah pengangguran, yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan tingkat upah. Sebaliknya, bilamana upah naik, alhasil jumlah penganggurannya turun. Maka, hal itu diinginkan bisa meminimalisir tingkat kemiskinan.

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
1	2017	5.52	9.38	5.96
2	2018	5.31	8.42	5.88
3	2019	5.25	8.22	5.40
4	2020	6.03	10.39	-2.48
5	2021	6.59	9.05	4.12
6	2022	6.01	8.28	4.87

Dari tabel di atas, terlihat data tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat kemiskinan, dan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dari tahun 2017 hingga 2022. Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mencapai puncaknya pada tahun 2021, mencapai 6.01%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mencapai titik tertinggi pada tahun 2020, yakni 10.39%. Laju pertumbuhan PDRB ADHK mencapai puncaknya pada tahun 2017, mencapai 5.96%

Pembahasan

Pada tahun 2017, Tingkat Pengangguran di Banten mencapai 9,38%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 8,42% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019, meskipun terjadi penurunan, tidak terlalu signifikan dengan tingkat sebesar 8,22%. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka secara drastis meningkat menjadi 10,39%. Hal ini memang wajar, karena pada tahun tersebut wabah COVID-19 sudah mulai

menyebar ke seluruh Negeri dan kebijakan Pemerintah untuk menajalankan PSBB, tahun 2021 angka Pengangguran mulai berkurang menjadi 9,05% dan pada tahun 2022 kembali turun ke angka 8,28%. Jika dilihat TPT di Prov Banten memang cukup berfluktuasi dan cenderung turun dari tahun ke tahun.

Tingkat kemiskinan di Prov Banten mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2022, sementara tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo tidak menunjukkan variasi yang signifikan. Pada 2017, penduduk miskinnya ada 5,52%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 5,31% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali merosot turun jadi 5,25% dan tahun 2020 naik menjadi 6,03%, hal ini masih berkaitan dengan pandemic COVID-19 dimana pada masa itu juga terjadi PHK masal dan membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya dan kembali naik padatahun 2021 menjadi 6,59% dan di tahun 2022 turun Kembali menjadi 6,01%.

Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Banten paling tinggi ada di Kabupaten Tangerang, mencapai rata-rata 226 ribu orang, sedangkan jumlah terendah terdapat di Kota Cilegon, yakni sekitar 15.620 jiwa. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Banten disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk status daerah tertinggal beberapa kabupaten di provinsi tersebut serta keterbatasan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian, yang membatasi potensi pengembangan ekonomi. Keterbatasan akses bagi kelompok miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya, termasuk modal

ekonominya seperti lahan pertanian dan keuangan, disebabkan oleh infrastruktur yang masih terbatas, termasuk jalan, sekolah, dan fasilitas ekonomi. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Tingkat pendidikan yang cenderung rendah pada penduduk miskin juga dapat disebabkan oleh keterbatasan akses mereka terhadap pendidikan. Dampaknya, dalam waktu yang singkat, menjadi sangat sulit untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut. Dengan demikian, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dipengaruhi oleh pengangguran dan kemiskinan.

V. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan di atas, maka bisa diambil simpulan yakni:

1. Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Banten mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2017-2024, mencapai puncaknya pada 2017 dengan 5,96% pertumbuhan tertinggi. Namun, terjadi penurunan drastis pada 2020, turun dari 5,40% menjadi -2,48%. Faktor penyebabnya adalah dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi Provinsi Banten dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten terkena fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2022. Namun, walau fluktuatif, angka ini tetap berada di bawah tingkat pengangguran nasional,

menunjukkan bahwa kondisi pengangguran di provinsi tersebut masih dapat dikatakan tidak parah.

3. Persentase kemiskinan di Provinsi Banten tidak terlalu berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Saran

1. Untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Banten, disarankan agar Pemda mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan pendapatan, akses kesehatan, dan pendidikan.
2. Disarankan agar Pemda Kab Banten meninjau kembali program bantuan kredit yang diberikan pada warga miskin, dengan mempertimbangkan kemudahan dalam tata cara bagi penerima manfaat. Langkah ini diharapkan bisa memperluas peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
3. Pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Banten, seperti penyediaan listrik dan jaringan jalan yang merata, diinginkan

bisa berkontribusi positif atas tumbuhnya ekonomi.

VI. Daftar Pustaka

- Fuad, M., Iqbal, F., & Basuki, M. U. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerentanan Kemiskinan Relatif Di Kota Jakarta Barat Tahun 2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 168. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Iii, B. A. B., Dan, O., & Penelitian, M. (2012). *No Title*. 43–51.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, P. (2016). *No Title*. 33–41.
- Menteri Pendidikan. (2007). *No Title* БИВМЫВМЫВ. *Ятыатат*, 235, 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Ni Putu & I made. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2004-2013*. 11–25.